

## **KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PPRT) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA**

Oleh

**Laras Syaffa Nasyira\* Dani Krisnawati\*\***

### **INTISARI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum PRT, serta mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang seharusnya dalam RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum PRT.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji RUU PPRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian eksploratoris. Penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber yang terdiri dari akademisi, perwakilan JALA PRT, dan LBH APIK Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Urgensi kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam RUU PPRT adalah untuk memberikan perlindungan kepada PRT selaku kelompok rentan yang membutuhkan payung hukum sehingga kriminalisasi dalam RUU PPRT merupakan langkah progresif untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT; (2) RUU PPRT perlu mengkriminalisasi larangan penahanan dokumen pribadi dan penahanan upah, diikuti dengan penambahan perbuatan-perbuatan pidana yang dapat merujuk pada Konvensi ILO 189 dan UU Perlindungan PRT di Filipina (*Batas Kasambahay*) sebagai bentuk perlindungan hukum PRT.

Kata Kunci :Kriminalisasi, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

\*\* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

***CRIMINALIZATION POLICY IN THE DESIGN OF DOMESTIC WORKER  
PROTECTION LAW (PPRT) AS A FORM OF LEGAL PROTECTION  
AGAINST DOMESTIC WORKERS***

By

**Laras Syaffa Nasyira\* Dani Krisnawati\*\***

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the urgency of the criminalization policy through the regulation of criminal acts and criminal sanctions in the PPRT Bill as a form of legal protection for domestic workers, as well as to determine and analyze the criminalization policy through the regulation of criminal acts and criminal sanctions that should be in the RUUPPRT Bill as a form of legal protection for domestic workers.*

*The research employs a normative legal method with statutory and comparative law approaches, is descriptive-prescriptive in nature, and utilizes secondary data supported by primary data obtained through interviews with relevant informants.*

*The results indicate that: (1) the urgency of regulating criminal acts and criminal sanction in RUU PPRT is to provide protection to domestic workers as a vulnerable group that requires a legal umbrella so that criminalization in RUU PPRT is a progressive step to provide legal protection for domestic workers.; (2) the RUU PPRT needs to add criminalization policy through the regulation of prohibited to withhold personal document and prohibited withhold wages, also add the regulation of criminal acts and criminal sanctions that can refer to ILO Convention 189 and the Domestic Workers Act in Philippines (Batas Kasambahay) as an instruments to enforce the protection of domestic workers.*

*Keyword :Criminalization, Domestic Workers, Protection*

---

\* Master of Laws Student Faculty of Law, Gadjah Mada University

\*\* Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University